

MAKSIGAMA

JURNAL HUKUM

Peran Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Nilai Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum (Suatu Kajian dari Perspektif Birokrasi)

The Legal Aspect of Criminal Act Trafficking in Indonesia

Tindakan Pemerintahan Negara Hukum dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Demokrasi Popularitas di Indonesia

Perlindungan Ham dalam Kuhap yang sering Dilanggar dalam Penangkapan dan penyidikan Tersangka

Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Implementasi Ide Dasar Sila-Sila Pancasila dalam Kebijakan Formulasi Sistem Pemindaan di Indonesia Saat Ini dan Masa yang akan Datang

Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Pembaharuan TDP Terhadap PT yang Belum Menyesuaikan Dengan UU-PT di Kab. Pasuruan

A Phenomenon Coercion of The Secondary Law Enforcement in Commercial Disputes Settlement

JURNAL HUKUM MAKSIGAMA

Diterbitkan oleh

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG**

Pelindung

Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang

Pengarah

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Penyunting

Dr. Drs. Widodo, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Sigit Budi Santoso, S.H., M.H.

Imam Ropii, S.Pd., S.H., M.H.

Sulis Setyowati, S.Pd., S.H.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. M. Noor Syam, S.H.

Prof. A. Masyhur Effendy, S.H., M.S.

Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.

Dr. Kusnu Goesniadhie S., S.H., M.Hum.

Mitra Bestari

Prof. Dr. I. Dewa Gede Atmadja, SH., MS.

Bambang Winarno, S.H., M.S.

Penyunting Tamu

Drs. H. M. Yuhdi Batubara, S.H., M.H. (Universitas Negeri Malang)

Moch. Ridwan, S.H., M.S. (Universitas Brawijaya)

Moch. Taufik Iman Santoso, S.H., M.H. (Universitas Surabaya)

Staf Administrasi

Ainur Rofiq, S.H.

Eko Indrayanto, S.T.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang,
Jl. Danau Sentani 99 Malang Kotak Pos 25. Telp. (0341) 713604. Fax. (0341) 713603

Jurnal Hukum Maksigama Universitas Wisnuwardhana Malang menerima sumbangan tulisan yang belum diterbitkan di media cetak lain. Naskah diketik sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam lembar bagian belakang sampul jurnal ini. Tulisan yang masuk dievaluasi oleh penyunting. Penyunting berhak melakukan perubahan untuk keseragaman format penulisan tanpa mengubah isinya. Jurnal ini diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan November.

JURNAL HUKUM MAKSIGAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
TAHUN 10, NOMOR 2, NOVEMBER 2007

DAFTAR ISI

- Suko Wiyono* Peran Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Nilai Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum (Suatu Kajian dari Perspektif Birokrasi), 1
- Milda Istiqomah* The Legal Aspect of Criminal Act of Trafficking in Indonesia, 16
- Sukarti Arisa Rosita* Tindakan Pemerintahan Negara Hukum dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*), 24
- R. Dwi Sulaksono* Demokrasi Popularitas di Indonesia,
- Sentot Yusuf Patrikha* Perlindungan Ham dalam Kuhap yang Sering Dilanggar dalam Penangkapan dan Penyidikan Tersangka, 44
- M. Dedi Putra* Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 54
- Saroso* Implementasi Ide Dasar Sila-Sila Pancasila dalam Kebijakan Formulasi Sistem Pidanaaan di Indonesia Saat Ini dan Masa yang akan Datang, 66
- Sayanto* **Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, 82**
- Khoirul Hidayah* Pembaharuan TDP Terhadap PT yang Belum Menyesuaikan dengan UU-PT di Kab. Pasuruan, 95
- Kasnu Goesniadhie S.* A Phenomenon Coercion of The Secondary Law Enforcement in Commercial Disputes Settlement, 108

BEBERAPA KENDALA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Suyanto

Abstract : Solving the poverty can be done by increasing the life of poor people through developing the local economy. We still can often find some obstacles in this effort, either strategically or generally. Strategic obstacle in raising the poverty is the high of poverty number and the job less in Indonesia, the high of degradation level of natural resources and also the low of local competition. The general obstacles in solving the poverty through developing the local economy, such as the domination of political vision of Indonesian economy. It self which still does not pay attention the poverty even it seems liberalism and capitalism, so the only strong investor can increase, meanwhile for the local developing realization less from the poor people in making the policy so that it does not take a profit for the poor people life for long periode.

Keywords : Obstacle, solving the poverty

Dewasa ini telah muncul kesadaran global untuk menurunkan jumlah orang miskin di dunia sebelum tahun 2015. Pemerintah dari berbagai negara di dunia bersama dengan lembaga-lembaga internasional dan nasional telah giat mengembangkan strategi dan pendekatan yang dapat diimplementasikan untuk menurunkan jumlah orang miskin.

Banyak faktor yang menyebabkan penduduk menjadi miskin, antara lain, kondisi sumber daya alam seperti rendahnya kesuburan tanah, kekurangan air akibat rendahnya curah hujan dengan pola distribusi curah hujan yang tidak menentu, terbatasnya akses terhadap lahan beririgasi dan gangguan hama penyakit tanaman adalah merupakan kendala serius yang dihadapi penduduk di berbagai daerah kabupaten/kota.

Selain faktor di atas, kelangkaan modal yang mudah diakses bagi penduduk miskin maupun pengusaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), terbatasnya akses terhadap lahan yang produktif, kurangnya infrastruktur fisik dan sosial, kurangnya akses terhadap pelayanan dan informasi serta beberapa faktor sosial budaya masyarakat merupakan faktor penting yang dapat membatasi masyarakat miskin maupun masyarakat lainnya yang bergerak dalam sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) untuk da-

Suyanto adalah Fakultas Pertanian Universitas Dr. Soetomo

pat melepaskan mereka dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Semenjak kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan awal 2001 telah memperluas ruang partisipasi politik bagi kaum miskin dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, sehingga ketimpangan ekonomi maupun sosial yang ada di masyarakat diharapkan dapat terpecahkan.

Otonomi daerah memang merupakan prasyarat penting untuk menuju perbaikan dan pemerataan kesejahteraan kaum miskin, namun itu saja tidak cukup. Untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut, harus ada politik ekonomi yang secara konsisten memihak kepada sektor ekonomi kaum miskin yang disertai strategi yang koheren untuk menunjang integrasi masyarakat miskin ke dalam usaha produktif dan mekanisme pasar.

Pengembangan ekonomi lokal untuk memerangi penduduk miskin telah menjadi isu lintas bidang dalam aktifitas kelompok-kelompok swadaya serta dalam diskusi-diskusi para pihak (*stakeholders*) di tingkat kabupaten. Oleh sebab itu, fokus program harus ditekankan pada upaya peningkatan produksi dan pemasaran hasil-hasil dari usaha penduduk miskin.

Pemeran utama dalam pengembangan ekonomi lokal sebenarnya ada pada lembaga-lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, pengusaha lokal, Kamar Dagang dan Industri, serta produsen lokal yang umumnya terdiri dari para petani dan nelayan serta pengrajin industri kecil lainnya. Peran-peran mereka sering tidak dapat berjalan optimal, karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi mereka.

Pada umumnya lingkungan ekonomi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur adalah masih didominasi pengembangan ekonomi lokal oleh sektor primer, dan sebagian lainnya oleh sektor sekunder dan jasa.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka penulisan ini penting untuk membantu memberikan alternatif pemecahan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, agar mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Masalah utama yang dapat disusun dalam laporan ini adalah "Bagaimana pengentasan kemiskinan regional dilakukan serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, baik kendala yang bersifat strategis dan yang bersifat umum?"

Tujuan dan Keterbatasan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan upaya pengentasan kemiskinan, langkah-langkah yang harus dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi, baik kendala yang bersifat strategis yang berupa tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingkat degradasi sumber daya alam, serta rendahnya daya saing lokal.

Tujuan lain dari penelitian ini memaparkan beberapa kendala yang bersifat umum dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, karena lemahnya visi politik ekonomi Indonesia sendiri yang kurang pro-poor, serta pelaksanaan pembangunan daerah kurang melibatkan penduduk miskin.

Beberapa Kendala Strategis dalam Menanggulangi Kemiskinan

Menurut Dendi dkk (2004), baliwa Indonesia kini sedang mengalami proses transformasi politik dan ekonomi yang dinamis, dimana proses desentralisasi yang cepat yang membawa kepada devolusi kekuasaan administrasi dan tanggungjawab kepada sekitar 400 kabupaten semenjak Januari 2001.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal telah diatur berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004. Berdasarkan kebijakan tersebut, kita telah diperkenalkan sistem fiskal baru antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperluas ruang partisipasi publik di daerah terutama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan pengawasan anggaran, sehingga pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan kendala dalam membangun kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Selanjutnya Dendi dkk (2004), menyatakan, bahwa pengembangan ekonomi lokal yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan kaum miskin, masih menemui beberapa hambatan dan kendala di lapangan, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat umum.

Kendala yang bersifat Strategis

Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kebijakan dan strategi pembangunan yang bersifat *pro-poor* sebenarnya telah dimulai semenjak awal kemerdekaan Indonesia hingga

emerintah orde baru dan sekarang ini dengan dikeluarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang kemudian kedua UU tersebut direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan, sebenarnya telah memberikan hasil yang menggembirakan hingga sebelum terjadinya krisis yang melanda sebagian Asia dan Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Berdasarkan laporan resmi di Indonesia menyajikan bahwa selama pada periode tersebut jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Indonesia turun secara drastis (Sumodiningrat, 2004 & BPS, 2004).

Krisis keuangan akhirnya meluas menjadi krisis ekonomi dan multi dimensi, krisis kepercayaan, politik dan sosial, tentunya beserta faktor-faktor akar penyebabnya pada akhirnya merusak kecenderungan keberhasilan prestasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak pertengahan abad 20.

Sampai dengan tahun 2004, diperkirakan setengah dari penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan. Buruknya akses pendidikan, kesehatan dan lingkungan dapat membuat penduduk Indonesia kembali masuk kedalam kategori penduduk miskin. Kehidupan mereka hanya sedikit diatas garis kemiskinan, karena itu sangat rentan terhadap perubahan harga.

Kini sekitar 16 juta jiwa atau sekitar 7,5 persen penduduk Indonesia tetap dibawah garis kemiskinan menurut standar Bank Dunia, yakni hidup dengan daya beli kurang dari 1 dolar Amerika Serikat per hari. Tetapi masih penduduk Indonesia yang rentan menjadi miskin, artinya mereka yang hidup dengan kurang dari 2 dolar Amerika Serikat per hari, dilaporkan lebih dari jumlah tersebut, yaitu lebih dari 110 juta jiwa atau sekitar 53 persen (Soedjito, 2004)

Berdasarkan pada laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 mengungkapkan bahwa IPM (*HDI-Human Development Index*) Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 177 negara. Ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakatnya relatif tertinggal dibanding negara-negara lain.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan sepasang persoalan berkaitan dua sisi mata uang. Setidak-tidaknya 10 juta orang dilaporkan tidak memiliki pekerjaan, dan bahkan mencapai sekitar 40 juta orang bila dimasukkan orang yang setengah menganggur. Penciptaan lapangan kerja yang layak merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam kondisi yang

belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi. Persoalan terbesar bagi Indonesia adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada.

Tingginya Degradasi Sumber Daya Alam

Laju kehilangan hutan di Indonesia diperkirakan setidaknya sekitar 1,5 sampai 2 juta hektar per tahun akibat pembukaan hutan oleh perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan hutan serta akibat penebangan liar (*illegal logging*) dan perladangan berpindah-pindah (*shifting cultivation*). Program penghijauan atau rehabilitasi hutan yang dilakukan selama ini, serta upaya penegakan hukum ternyata tidak dapat mengimbangi laju kehilangan hutan (*deforestation*) yang begitu cepat. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.

Di samping berbagai kelemahan disain pendekatan dan implementasi program, ada banyak persoalan mendasar, antara lain persepsi masyarakat yang menganggap struktur penguasaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan akibat kebijakan yang terlalu memihak kepada pengusaha besar, kebijakan yang cenderung tidak menghargai hak-hak ulayat masyarakat adat (*communal property rights*), kelangkaan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian, sikap "setengah hati" para penguasa untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta masih tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sebagainya.

Persoalannya bertambah rumit manakala deforestasi diikuti oleh degradasi lahan yang pada gilirannya juga menghasilkan efek eksternalitas yang merusak ekosistem hilir (*downstream ecosystems*) di daratan rendah maupun kawasan pesisir pantai. Persoalan sumberdaya alam ini seharusnya menjadi pusat perhatian utama bagi pemerintah, karena peranannya dalam jangka panjang sangat menentukan kehidupan bangsa kita.

Lemahnya Tingkat Persaingan Regional-Global

Adanya semangat liberalisasi ekonomi dan perdagangan memang merupakan sebuah kenyataan, meskipun masih ada beberapa prasyarat dan aturan main yang masih diperdebatkan oleh wakil-wakil negara industri (negara maju) dengan wakil-wakil negara berkembang, termasuk soal subsidi domestik dan ekspor yang diberikan negara-negara industri maju kepada petani dan eksportir produk-produk pertanian mereka. Kebijakan subsidi yang diterapkan negara-negara maju tersebut dipandang sebagai

macam serius bagi daya saing produk-produk pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Meskipun debat akademik tentang geologi politik ekonomi modern masih terus berlangsung dan gerakan anti-globalisasi semakin gencar dipelopori oleh para cendekiawan ekonomi tertentu serta politikus maupun elit masyarakat sipil, persepsi publik bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan peluang baru bagi pengembangan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga semakin populer di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa globalisasi dan liberalisasi akan menciptakan taman ekonomi (*economic playing fields*) yang kompleks dan penuh risiko, karenanya kebijakan desentralisasi dan deregulasi juga diiringi dengan upaya-upaya menyinergikan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro dan kecil-menengah (sektor UMKM).

Tetapi, Indonesia masih relatif lebih rendah daya tarik investasinya dan lebih rentan terhadap resiko globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia.

World Investment Report (2004:10) mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke-139 dari 144 negara yang menjadi tujuan investasi dunia. Sebagai perbandingan, Brunei Darussalam berada pada urutan ke-2 setelah Belgia dan Luksemburg yang menduduki urutan pertama. Negara Asia Tenggara lainnya, yakni Singapura, berada pada urutan ke-6, sedangkan Malaysia berada pada urutan ke-75, Myanmar urutan ke-85 dan Thailand di urutan ke-87.

Disamping kondisi dalam negeri yang berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor yang paling dikhawatirkan para investor adalah kondisi keamanan serta citra tingginya korupsi di Indonesia. Meskipun upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum mulai dilaksanakan secara lebih serius di Indonesia, persepsi ekonomi biaya tinggi di Indonesia melihatnya masih sulit untuk dihapus dalam waktu singkat.

Disamping realita korupsi yang belum dapat diberantas sepenuhnya sampai kini, besarnya jumlah pegawai negeri merupakan salah satu penyebab ketidakefisienan dan ekonomi biaya tinggi di Indonesia.

Laporan Bank Dunia mengungkapkan bahwa biaya untuk memulai investasi Indonesia tergolong paling tinggi diantara negara-negara ASEAN, yakni sekitar 1.163 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp.

10.000.000. Disamping biaya, waktu yang diperlukan untuk mengurus sampai keluarnya izin bisnis di Indonesia juga terlamadiantara negara-negara Asean, yakni sekitar 150 hari. Sebagai perbandingan, biaya untuk memulai berinvestasi di Malaysia adalah sekitar 966 dolar AS dan izin bisnis keluar dalam tempo 30 hari, sementara di Thailand lebih murah dan lebih cepat dimana biayanya sebesar 160 dolar AS dan izin bisnis diperoleh dalam tempo sekitar 33 hari.

Persolan-persoalan tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian kita untuk meningkatkan daya saing agar ekonomi bangsa Indonesia menjadi lebih efisien dan maju.

Kendala yang bersifat Umum

Kurangnya visi politik ekonomi Indonesia

Bahwa adanya realita yang terjadi pada masa krisis keuangan dan ekonomi memberikan pengalaman bahwa sektor ekonomi rakyat tidak saja memiliki daya tahan atau daya lenting (*resilience*) yang mengagumkan melampaui taksiran elit cendekiawan ekonomi tetapi juga telah menjadi faktor penyelamat ekonomi nasional dari 'keruntuhan'. Belajar dari pengalaman tersebut sudah sepantasnya para pembuat kebijakan baik di pusat maupun di daerah dan cendekiawan menjadikan sektor ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan kesanalah kebijakan dan dukungan difokuskan.

Perspektif ini sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertulis dalam pasal 33. Meletakkan fokus pada sektor ekonomi rakyat, yang notabene adalah sektor usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM) bukan berarti mengabaikan sektor swasta skala besar.

Malah sebaliknya kebijakan dan pelayanan publik semestinya menjadi insentif untuk memperluas peluang bagi terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan perusahaan mikro dan kecil-menengah. Salah satu contoh peluang kemitraan yang belum termanfaatkan secara signifikan adalah peluang koperasi untuk memiliki sebagian saham perusahaan publik/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau saham perusahaan swasta, meskipun telah ada kerangka legal formal yang menunjangnya. Sekiranya pemerintah dapat memfasilitasi koperasi untuk memperoleh sebagian saham BUMN maupun perusahaan swasta melalui kebijakan penguatan modal koperasi, misalnya dengan mengurang

subsidi bahan bakar minyak serta subsidi pupuk dan mengalihkan dananya untuk bantuan modal koperasi disamping untuk biasanya dana kesehatan dan pendidikan, maka masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah (sektor UMKM) yang menjadi anggota koperasi akan memperoleh keuntungan yang semakin besar dari rantai produktif dan pemasaran produk maupun jasa. Pada gilirannya akan ada dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidupnya.

Sektor UMKM kita semakin hari menjadi kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, para konglomerat dalam negeri. Hal ini jelas-jelas menjadi persoalan bangsa Indonesia yang dijamin atas konstitusi untuk menghidupkan koperasi dan usaha kecil lainnya. Secara filosofis terhadap tinjauan dalam pendirian BUMN adalah dalam rangka untuk memakmurkan rakyatnya untuk kaum miskin.

Kurangnya Pembangunan Daerah yang Pro-Poor

Kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 memberikan landasan legal yang kuat bagi strategi pengembangan ekonomi lokal.

Dewasa ini Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 207 juta jiwa lebih, yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa dan dialek serta beragam agama merupakan realita yang kompleks dan rawan konflik.

Dari perspektif ekonomi, implementasi otonomi daerah diharapkan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar. Pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat daerah tentunya lebih mengenal dan memahami potensi daerahnya. Tetapi, penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi tersebut ternyata belum efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Birokrasi yang diciptakan terlalu "gemuk" dan kemampuan sumber daya manusianya masih belum optimal. Disamping itu pemerintah daerah pada umumnya sangat mementingkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada peningkatan Produk sebagai upaya meningkatkan pemasukan/kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan yang berfokus pada PAD tersebut diimplementasikan melalui pemberlakuan berbagai macam pungutan, baik berupa retribusi,

pajak maupun pembayaran-pembayaran lainnya (*fees*). Pungutan-pungutan tersebut menambah mengganggu minat investor domestik maupun luar negeri, dan menghambat orang miskin maupun pengusaha untuk memulai maupun mengembangkan bisnis. Jika konsisten dengan prinsip pembangunan ekonomi yang pro-masyarakat miskin, seyogyanya pemerintah daerah tidak hanya memikirkan peningkatan PAD tetapi lebih kepada bagaimana memperluas kapasitas fiskal daerah dan memperluas basis produktif sektor ekonomi rakyat.

Dengan kata lain, strategi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto lebih relevan daripada sekedar peningkatan PAD. Sejalan dengan itu, perluasan basis fiskal pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas para perencana di daerah dalam memformulasikan kebijakan ekonomi dipandang sangat penting untuk mendukung daerah membangun.

Sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mesti ditingkatkan, sehingga program-program pemerintah pusat di daerah yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, diperlukan "payung nasional" (*Blue Print*) pembangunan ekonomi yang dapat menjadi acuan daerah-daerah untuk menciptakan sinergi pembangunan nasional.

Dengan perspektif daerah membangun, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat luas (*civil society*) dalam perumusan politik ekonomi, kebijakan pembangunan dan pengawasan anggaran menjadi sesuatu yang penting. Untuk tujuan ini diperlukan regulasi yang fleksibel yang menumbuhkan dan menggiatkan dialog *stakeholders* (forum *stakeholders*) mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional.

Sekarang ini forum-forum *stakeholders* memang telah mulai banyak bermunculan di tingkat pusat, namun hampir semuanya sangat tinggi ketergantungan finansialnya kepada donor dari luar negeri.

Dalam pembangunan daerah ini yang perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana peningkatan partisipasi publik utamanya kaum miskin ikut dalam perencanaan dan pembuatan program untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan kehidupan kaum miskin, meskipun di lapangan masih banyak kita menemui beberapa hambatan dan kendala, baik kendala yang bersifat strategis maupun yang bersifat umum. Kendala yang bersifat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ini meliputi: (1) masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia; (2) adanya degradasi sumber daya alam yang semakin tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian serius; serta (3) adanya upaya peningkatan daya saing regional-global. Sedangkan kendala-kendala yang bersifat umum dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, diantaranya adalah : visi politik ekonomi Indonesia sendiri masih yang kurang berpihak pada *pro-poor*, bahkan cenderung pada liberalisme dan kapitalisme, sehingga pemodal yang kuat yang dapat berkembang, sementara dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurang melibatkan penduduk miskin dalam pembuatan kebijakan. Hal ini kurang menguntungkan penduduk miskin dalam jangka panjang.

Saran

Penanggulangan kemiskinan seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait yang dapat dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kehidupan kaum miskin; (2) upaya pengentasan kemiskinan harus selalu dilakukan dengan mengurangi berbagai kendala dan hambatan yang ada, baik yang bersifat strategis, maupun yang bersifat umum; (3) kendala-kendala yang bersifat strategis terutama mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mengurangi degradasi sumber daya alam, serta meningkatkan daya saing bagi daerah. Sedangkan kendala yang bersifat umum adalah membangun visi politik ekonomi Indonesia yang *pro-poor* serta meningkatkan peran kaum miskin dalam pembangunan daerah.

Daftar Rujukan

Alisyahbana, Armida S. 2000. "*Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*". Makalah, Disajikan dalam kongres ISEI tanggal 22 April 2000 di Makassar.

- BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004, Laporan Pembangunan Manusia 2004. Ekonomi dari Demokrasi, Membiayai pembangunan manusia Indonesia, Jakarta.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan*, Cetakan keenam, Yogyakarta: BPFE.
- _____, 2002. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal. *Paper* disampaikan pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, 11 Pebruari 2002. Jakarta.
- Davey, Kenneth, 1989, "*Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia*" dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: UI Press.
- Dwiyanto, Agus. Dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- _____. 2003. *Reformasi: Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- Dendi, A., Heile, J.H., Mahman dkk, 2004, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Kerjasama Departemen Dalamnegeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan gtz Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammernarbeit (GTZ) GmbH.
- INDEF. 2003. *Pertumbuhan Tanpa Daya Saing*. Laporan pertengahan tahun. Jakarta: indef.
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. "*Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan*", Prisma No. 43 hlm 3-7, Jakarta.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Khusaini, Moh. 2006. Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya Terhadap efisiensi Ekonomi Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur), disertai Universitas Brawijaya (Tidak dipublikasikan).
- Lembaga Penelitian Semeru. 2002. *Mencari Alternatif Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran dari Daerah*. Disampaikan pada Workshop: Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal. Kerjasama LIPI dengan Semeru. Jakarta, 20 Agustus 2002.
- Mahi, R. 2002. *Strategi Pembiayaan Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah: Pengalaman Internasional dan Indonesia*. Analisis CSIS. 31 (4): 422-435.

- Majidi, Nasith. 1997. "Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antardaerah" dalam Prisma, No. 3 Maret 1997, Jakarta: LPES.
- Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta : BPFE.
- Nangga, Muangga. 1991. "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi Kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek". Thesis PPS UGM, Yogyakarta.
- Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, 2000, Laporan Akhir Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau Dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah, kerjasama Direk-torat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomika UGM, Yogyakarta.
- Riyadi, and D.S. Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 360 pp.
- Rachbini, D.J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. 206 pp. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinring, Bahar. 2002 : 65-66. *Analisis Kemandirian Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi Memasuki Era Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan*. Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sidik, M. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara teori dan aplikasinya di Indonesia)", Makalah seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sondakh, Lucky W. 1994. "Pembangunan Daerah dan Perekonomian Rakyat" dalam PRISMA, No. 8, Agustus 1994, Jakarta: LP3ES.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta.: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Perwira.
- Sumawata, S. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko, M. 2001. *Ekonomi Politik: Untuk Keuangan dan Pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. 175 pp. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta (Direvisi menjadi UU No. 32/2004).
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta (Direvisi menjadi UU No. 33/2004).